



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YASIR
2. Jabatan : VICE PRESIDENT ADMINISTRASI KONSTRUKSI JAWA, MADURA, BALI,
MALUKU, PAPUA DAN NUSA TENGGARA
3. NHK : 196284

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.606.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/90 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/90 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 760 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 136.000.000
4. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 504.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS/HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.969.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.158.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.158.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.